PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi pada KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Periode 2010 - 2014)

BELINDA NIBENIA LAOLI
21111150
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Tax receipts in the Territory of the KPP Bandung and KPP Sumedang on has decreased because of the potential taxpayers who do not pay taxes orderly and not paying taxes properly, with this area of town KPP Bandung and KPP Sumedang issued a tax bill to the taxpayer, the purpose of issuance expected tax bill tax revenue in the city of KPP Bandung and KPP Sumedang increasing. The purpose of this study are: 1. To determine the effect of tax collection to tax revenues, 2. Effect of the number of taxpayers towards tax revenues.

The method used in this research is descriptive approach and verification approach. Sampling method in this research is to use the method Saturated samples. The unit of analysis in this study was 5 KPP Bandung Region and KPP Sumedang the regional office of the directorate general of taxation west java consisting of 5 period 2010-2014 tax year. While analysis of data using multiple linear regression. Testing this hypothesis using a statistical t-test with SPSS V.21.

Based on the results of the study, that variable tax collection showed a positive correlation, significant influence normal and also contribute to the tax revenue. And for a variable number of taxpayers showed a positive relationship, a significant effect and also contribute to the higher tax revenues.

Keyword : tax collection, taxpayer, tax revenues

I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Waluyo (2009:2), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya yang terutang oleh wajib pajak membayarkannya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45), peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan, lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan surat tagihan, surat teguran atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Menurut Soemarso S.R, (2007:13), Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penagihan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Menurut (Soemarso S.R, 2007:13) Kewajiban pajak muncul dari sisi wajib pajak karena undang-undang, kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang memberikan hak kepada Negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh Negara dapat dipenuhi karena pada dasarnya penagihan pajak berkaitan dengan tindakan memaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang utama yaitu membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2011 : 7), wajib pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya jumlah wajib pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Menurut Amina Lainutu (2013 : 374) juga mengungkapkan bahwa dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak, bahwa ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:56), potensi pajak sebenarnya masih sangat besar, upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan diuraikan adalah, sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh data dan meneliti mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

Tujuan dari penelitian ini yakni, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunkan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan dapat dijadikan pembanding dalam penelitian yang sama.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2008 : 3) yang dimaksud dengan pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan hukum, mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara".

Menurut Waluyo (2011 : 3) yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah Penerimaan Negara yang digunkan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat".

2.1.2 Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 76) yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita".

Menurut Muhammad Rusjdi (2007 : 17) yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

"Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang".

2.1.3 Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 75) yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

Menurut Waluyo (2009 : 23) yang dimaksud dengan wajib pajak adalah :

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan perpajakan".

2.1.4 Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325) yang dimaksud dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Menurut Moh. Zain (2005:105) yang dimaksud dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

"Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman".

2.2 Kerangka Berfikir

Menurut Muhamad Nazir (2009 : 75) yang dimaksud dengan Kerangka Pemikiran adalah sebagai berikut :

"Kerangka Pemikiran gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis".

1. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungakan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 189) sebagai berikut:

"Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungakan Jumlah Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menurut Mohammad Zain (2005 : 30) sebagai berikut:

"Pada dasarnya tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang sangat tinggi".

2.3 Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010 : 57) yang dimaksud dengan hipotesis adalah :

"Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka".

Maka, hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagi berikut:

H_1 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

H_2 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013 : 2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2008 : 30) pengertian operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

"Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Operasionalisasi Variabel diperlukan untuk menentukan jenis indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak dan julah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

3.3 Sumber Data

Menurut Andi Supangat (2007 : 2) yang dimaksud dengan data sekunder adalah :

"Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) dari objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian baru para pengguna".

Dengan demikian, sesuai pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian dari data sekunder adalah data yang didapat dengan cepat karena sudah tersedia sebelumnya seperti: Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi yang dilakukan untuk menggali teori-teori yang berhubungan dengan penulisan hasil penelitian agar supaya dapat dijadikan data

sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau laporan yang dapat membantu kelancaran peneliti dalam penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi pada umumnya sering diartikan sekumpulan data/objek yang ditentukan melalui kriteria tertentu, biasanya mengidentifikasikan suatu fenomena.

Menurut Sugiyono (2013:115) menjelaskan pengertian populasi adalah sebagai berikut:
"Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Untuk mengambil sampel penelitian penulis berpedoman pada pendapat yang dikemukakan sebagai berikut :

Menurut Umi Narimawati (2010: 38) sampel adalah sebagai berikut:
"Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)
   Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:

   a. Penelitian Lapangan
      Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I yang menjadi objek penelitian.
   b. Observasi (Pengamatan Langsung)
      Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
   c. Dokumen-dokumen
      Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai jumlah STP, Jumlah Wajib Pajak, dan Penerimaan pajak periode 2010-2014.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Metode Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41) mendefinisikan rancangan analisis adalah sebagai berikut:

> "Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013 : 134) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:
"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

1. Hipotesis parsial antara variabel bebas Penagihan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak
   H_o : Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014
   H_a : Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014
2. Hipotesis parsial antara variabel bebas Jumlah Wajib Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak
   H_o : Jumlah Waib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014
   H_a : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan hipotesis alternatifnya (H_1) : $\beta \neq 0$

$H_0 : \beta = 0$: Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014

$H_1 : \beta \neq 0$: Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014

$H_0 : \beta = 0$: Jumlah Wajib Pajak Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014

$H_1 : \beta \neq 0$: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Objek dalam penelitian ini adalah penagihan pajak, jumlah wajib pajak, dan penerimaan pajak. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014. Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

4.1.1.1 Deskriptif Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010-2014

Dari KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I pada KPP Karees pada tahun 2011, KPP Bojonegara pada tahun 2013, dan KPP Cicadas pada tahun 2014 mengalami penambahan jumlah surat tagihan yang diterbitkan namun tidak diikuti dengan penerimaan nya yang mengalami penurunan pada KPP Karees pada tahun 2011, KPP Bojonegara pada tahun 2013, dan KPP Cicadas pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan jumlah surat tagihan pajak yang terealisasi tidak mencapai target pada saat diterbitkan surat tagihan pajak.

4.1.1.2 Deskriptif Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010-2014

Dari KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I pada KPP Karees pada tahun 2011, KPP Bojonegara pada tahun 2013, dan KPP Cicadas pada tahun 2014 mengalami penambahan jumlah wajib pajak namun tidak diikuti dengan penerimaan nya yang mengalami penurunan pada KPP Karees pada tahun 2011, KPP Bojonegara pada tahun 2013, dan KPP Cicadas pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan kurang kesadaran dari wajib pajak yang membayar dan melaporkan kewajiban nya membayar pajak.

4.1.2 Analisis Verifikatif

1. Pengujian Asumsi Klasik

a) Uji Asumsi Normalitas. Menurut Singgih Santoso (2002 : 393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal. Diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,291. Nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Asumsi Multikolinieritas. Menurut Gujarati (2003:362) persamaan *Variance Inflation Factors (VIF)* adalah Dimana R_i^2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas X_1 terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas. Diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinieritas*.

c) Uji Asumsi Heteroskedastisitas. Menurut Gujarati (2003:406) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara sebagai berikut Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen). Diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas.*

d) Uji Asumsi Autokorelasi. Menurut Jonathan Sarwono dan Herlina Budiono (2012:179) ketentuan akan terjadi autokorelasi jika nilai Durbin-Watson 1 < DW > 3. Diketahui nilai dw sebesar 1,149. Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika durbin watson sebesar < 1 dan > 3. Dari nilai-nilai di atas, diketahui bahwa nilai dw (1,149) < 3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Jonathan Sarwono (2007:79) pengertian regresi linear berganda adalah :

"Regresi linear berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linear yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung".

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar -428.765.681.797, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas yakni penagihan pajak dan jumlah wajib pajak bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka penerimaan pajakakan bernilai sangat kecil yakni sebesar -428.765.681.797.
b. Nilai penagihan pajak sebesar 8.186.766,482, memiliki arti bahwa jika penagihan pajak mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajakakan mengingkat sebesar 8.186.766,482.
c. Nilai jumlah wajib pajak sebesar 9.000.285,361, memiliki arti bahwa jika jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1 orang sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 9.000.285,361.

4.1.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010-2014

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak nilai korelasi (R) yang diperoleh antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,602. Nilai 0,602 menurut Sugiyono (2013:195) berada pada interval 0,40 − 0,70 termasuk kategori sedang/cukup dengan nilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak, dimana semakin tinggi penagihan pajak maka akan diikuti semakin tingginya penerimaan pajak.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 36,2%. Artinya penagihan pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 36,2% terhadap penerimaan pajak sedangkan sisanya 53,8% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Pemeriksaan Pajak, *Self Assessment System*, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis untuk penagihan pajak sebesar 3,664 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,052. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,664>2,052) maka H_0 ditolak, artinya penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

4.1.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010-2014

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak nilai korelasi (R) yang diperoleh antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,700. Nilai 0,700 menurut Sugiyono (2013:195) berada pada interval 0,70 − 0,90 termasuk kategori sedang/cukup dengan nilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak, dimana semakin tinggi jumlah wajib pajak maka akan diikuti semakin tingginya penerimaan pajak.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 49,0%. Artinya jumlah wajib pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 49,0% terhadap penerimaan pajak sedangkan sisanya 51,0% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Pemeriksaan Pajak, *Self Assessment System*, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis untuk jumlah wajib pajak sebesar 4,851 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,052. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (4,851>2,052) maka H_0 ditolak, artinya jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010-2014

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan pajak pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 36,2%. Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:189).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Zakiah M Syahab dan Hantoro Arif Gisjianto (2008) yang hasil penelitiannya menunjukan

bahwa penagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak dan hasil penelitian oleh Ayu Widiawati (2013) menunjukan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Begitu juga hasil penelitian oleh Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2013) bahwa penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak.

KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang juga agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui surat tagihan pajak dan disarankan agar petugas perpajakan untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan pajak.

4.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Wilayah Kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010-2014

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah wajib pajak pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 49,0%. Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada satupun verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang sangat tinggi (Mohammad Zain, 2005:30).

Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang, maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Yudi Hariyanto dan Siti Ragil H (2014) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak dan hasil penelitian oleh Wati Aris Astuti dan Heru Rusdianto (2014) bahwa jumlah wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak begitu juga hasil penelitian oleh Nanik Fitriani (2013) bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak.

KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang juga agar terus mengawasi jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya dan disarankan agar petugas perpajakan untuk mengsosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014. Dapat disimpulkan semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Wilayah kota bandung dan KPP Sumedang.

2. Jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I periode 2010 – 2014. Dapat disimpulkan semakin tinggi penambahan jumlah wajib pajak dengan sosialisasi pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Wilayah kota bandung dan KPP Sumedang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Saran Praktis

a. KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui surat tagihan pajak yang diterbitkan, selain itu untuk petugas perpajakan agar mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

b. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan jumlah wajib pajak yang terus bertambah, disarankan kepada wajib pajak untuk tidak menghindari kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, sedangkan untuk KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau wajib pajak yang tidak efektif, selain itu untuk petugas perpajakan agar mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

2. Saran Akademis

a. Dalam pengembangan ilmu terkait penagihan pajak dan jumlah wajib pajak serta penerimaan pajak di bidang akuntansi khususnya perpajakan diharapkan hasil ini agar dapat dijadikan acuan kedepannya. Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dengan besar kontribusi pengaruh parsial yang di berikan sebesar 36,2%. Namun sebesar 63,8% adalah faktor lain yaitu peneliti dapat menggunakan dan mencari variabel lain seperti pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan *Self Assessment System* dan kebijakan pajak, dalam mempengaruhi penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan besar kontribusi pengaruh parsial yang diberikan sebesar 49,0%. Namun sebesar 51,0% adalah faktor lain yaitu dari pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan *Self Assessment System* dan kebijakan pajak.

b. Bagi peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan tentang pengaruh penagihan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Wilayah kota Bandung dan KPP Sumedang di Kanwil DJP Jawa Barat I. Penelitian yang dilakukan sekarang ini memang terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak, namun dengan mengganti variabel-variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini bisa saja dilakukan sehingga mungkin didapatkan hasil yang berbeda pula.

DAFTAR PUSTAKA

B. Ilyas. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati. 2003. *Statistik Ekonometrika*. Jakarta : Bumi Aksara.

H. Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30)

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jonathan *Sarwono*, *2007 Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi Offset.

Jonathan Sarwono dan Herlina Budiono. 2012. *Statistik Terapan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Muhammad Rusjdi. 2007. *Pajak Penghasilan Edisi 4*. Jakarta : Indeks.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi.* Jakarta : Salemba Empat.

Nanang Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Gava Media.

Rochmat Soemitro. 2008. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: Refika Aditama.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2010). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Singgih Santoso. 2002. *Statistik Parametrik, Cetakan Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komperhensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharno, 2003, *MPM., Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Direktorat PBB dan BPHTB*. Jakarta :Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

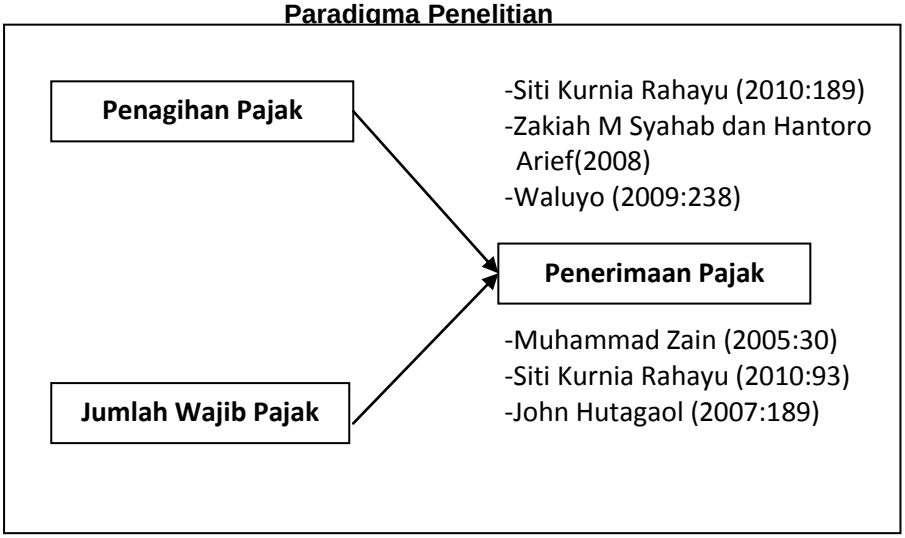
Umi Narimawati., Sri Dewi Anggadini., Linna, Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi : Genesis.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*: *Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

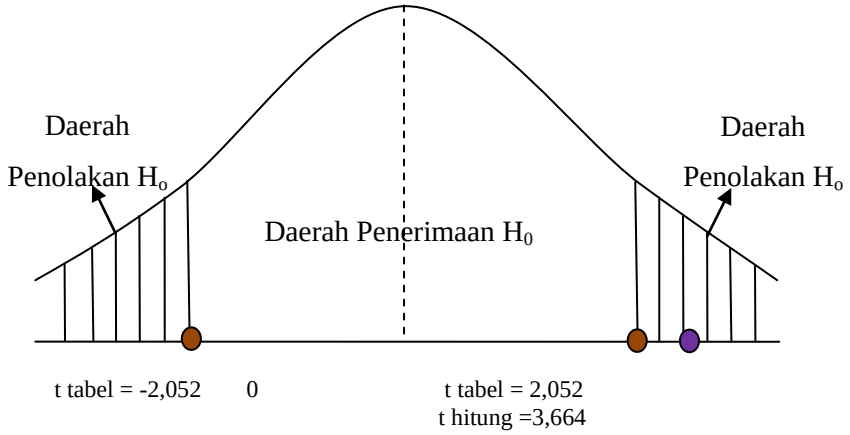
Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Independen: Penagihan Pajak (X_1)	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, menjual barang yang telah disita**.** **(Mardiasmo : 2011)**	-Surat Tagihan Pajak -SKPKB -SKPKBT -Surat Keputusan Keberatan -Surat Keputusan Pembetulan -Surat Putusan Banding **(Siti Kurnia Rahayu, 2010:186)**	Rasio
Independen: Jumlah Wajib Pajak (X_2)	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. **(SitiResmi :2011)**	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar **(SitiResmi :2011)**	Rasio

Dependen: Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.**(John Hutagaol ,2007)**	Penerimaan Pajak **(Siti Kurnia Rahayu, 2010)**	Rasio

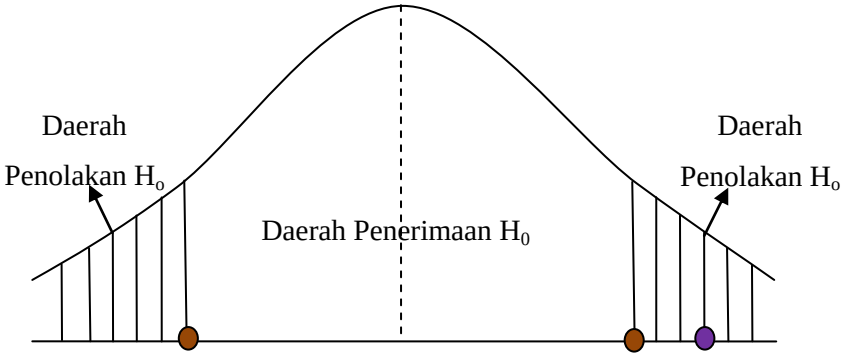
Tabel 3.2
Tabel Populasi

No	Nama KPP	Tahun	Periode
1.	KPP Pratama Bandung Karees	2010-2014	5
2.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	2010-2014	5
3.	KPP Pratama Bandung Cicadas	2010-2014	5
4.	KPP Pratama Bandung Tegalega	2010-2014	5
5.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	2010-2014	5
6.	KPP Pratama Sumedang	2010-2014	5
			30

Gambar 4.9
Kurva Uji Hipotesis Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak



Gambar 4.9
Kurva Uji Hipotesis Jumlah wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak



t tabel = -2,052 0 t tabel = 2,052
t hitung =4,851